

MODERASI BERAGAMA SEBAGAI PILAR PERDAMAIAN DI MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Shela Puspitasari¹, Iqbal Amar Muzaki², Nur Aini Farida³

^{1,2,3}Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam,

Universitas Singaperbangsa Karawang

¹shelapuspitasari215@gmail.com, ²iqbalamar.muzaki@staff.unsika.ac.id,

³nfarida@fai.unsika.ac.id

ABSTRACT

Indonesia's religious, ethnic, linguistic, and cultural diversity is a national asset, but it can also generate social tension when differences are managed through exclusion, prejudice, or violence. This article examines religious moderation as a framework for sustainable peace in a multicultural society. The study uses a descriptive qualitative approach through a literature review of academic articles, books, official documents, and relevant empirical studies. The literature was classified into four indicators of religious moderation: national commitment, tolerance, non-violence, and accommodation of local culture. The analysis shows that these indicators form an interconnected social architecture. Tolerance creates space for dialogue, non-violence directs conflict resolution toward deliberation, national commitment provides a shared civic framework, and local wisdom makes moderate values contextually acceptable. Religious leaders and educational institutions are strategic actors in internalizing these values, while digital radicalism, exclusive interpretation, group polarization, and low diversity literacy remain major challenges. Strengthening peace therefore requires inclusive education, interfaith dialogue, credible digital counter-narratives, public policy support, and the revitalization of local wisdom. Religious moderation should be positioned not merely as religious discourse, but as a civic and cultural strategy for maintaining justice, cohesion, and peaceful coexistence.

Keywords: religious moderation, peace, multicultural society, tolerance, social cohesion

ABSTRAK

Keberagaman agama, suku, bahasa, dan budaya merupakan modal kebangsaan, tetapi juga dapat memunculkan ketegangan sosial apabila dikelola melalui eksklusivisme, prasangka, atau kekerasan. Artikel ini menganalisis moderasi beragama sebagai kerangka pembangunan perdamaian berkelanjutan dalam masyarakat multikultural. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui studi literatur terhadap artikel ilmiah, buku, dokumen resmi, dan penelitian empiris yang relevan. Literatur diklasifikasikan berdasarkan empat indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa keempat indikator tersebut membentuk arsitektur sosial yang saling berkaitan. Toleransi membuka ruang dialog, anti-kekerasan mengarahkan penyelesaian konflik melalui musyawarah, komitmen kebangsaan menyediakan kerangka kewargaan bersama, sedangkan kearifan lokal membuat nilai moderat lebih kontekstual dan mudah diterima. Tokoh agama dan lembaga pendidikan menjadi aktor strategis dalam

internalisasi nilai tersebut, sementara radikalisme digital, penafsiran eksklusif, polarisasi kelompok, dan rendahnya literasi keberagaman masih menjadi tantangan utama. Penguatan perdamaian memerlukan pendidikan inklusif, dialog lintas iman, kontra-narasi digital yang kredibel, dukungan kebijakan publik, dan revitalisasi kearifan lokal.

Kata Kunci: moderasi beragama, perdamaian, masyarakat multikultural, toleransi, kohesi sosial

A. Pendahuluan

Indonesia dibentuk oleh keragaman identitas yang sangat luas. Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan keberadaan lebih dari seribu kelompok suku dengan bahasa, adat, dan ekspresi kebudayaan yang berbeda (Badan Pusat Statistik, 2011). Keragaman tersebut merupakan sumber daya sosial, tetapi tidak otomatis menghasilkan kerukunan. Perbedaan dapat berubah menjadi konflik ketika identitas dipakai untuk membangun batas eksklusif, menyebarkan prasangka, atau membenarkan diskriminasi. Karena itu, perdamaian dalam masyarakat multikultural harus dibangun melalui tata nilai dan praktik sosial yang mampu mempertemukan keteguhan keyakinan dengan penghormatan terhadap hak orang lain.

Moderasi beragama menawarkan kerangka tersebut. Moderasi tidak dimaksudkan untuk mengurangi ajaran atau kesungguhan beragama, melainkan menata cara pandang, sikap, dan perilaku agar tidak berlebihan serta tetap berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) merumuskan empat

indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Akhmadi (2019) menempatkan moderasi sebagai kebutuhan praktis dalam kehidupan Indonesia yang majemuk, sedangkan Fahri dan Zainuri (2020) menegaskan relevansinya untuk mereduksi radikalisme melalui pendidikan Islam yang inklusif.

Moderasi beragama penting karena konflik keagamaan jarang berdiri sendiri. Konflik sering berkelindan dengan ketimpangan sosial, kompetisi politik, penyebaran informasi palsu, dan mobilisasi identitas. Di ruang digital, otoritas keagamaan menjadi terfragmentasi dan narasi ekstrem dapat tersebar tanpa proses verifikasi yang memadai. Hefni (2020) menunjukkan bahwa pengarusutamaan moderasi di ruang digital diperlukan sebagai kontra-narasi terhadap konten yang menguatkan politik identitas dan tribalisme. Dengan demikian, moderasi harus hadir sebagai kemampuan literasi, etika komunikasi, dan kecakapan mengelola perbedaan, bukan hanya sebagai slogan kelembagaan.

Dalam konteks pendidikan, pendekatan multikultural tidak berhenti pada pengakuan formal terhadap perbedaan. Pendidikan perlu menumbuhkan empati, kesediaan berbagi ruang, dan kemampuan bekerja sama melampaui identitas kelompok. Muzaki dan Tafsir (2018) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural dalam perspektif Islam memuat penghormatan terhadap kebudayaan, toleransi, dan kesediaan hidup bersama secara damai. Saputri, Putranto, dan Setyaningrum (2023) juga menekankan bahwa nilai keadilan, toleransi, dan inklusivitas dapat membangun wawasan moderat dalam masyarakat multikultural.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis fungsi moderasi beragama sebagai pilar perdamaian, menjelaskan hubungan antarempat indikatornya, serta merumuskan strategi penguatan melalui pendidikan, tokoh agama, kebijakan publik, ruang digital, dan kearifan lokal. Kajian difokuskan pada konteks Indonesia sebagai masyarakat multikultural dengan kebutuhan menjaga kebebasan beragama sekaligus kohesi kebangsaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode studi literatur. Data berasal dari buku, dokumen resmi, dan artikel jurnal yang membahas moderasi beragama, pendidikan multikultural, toleransi, perdamaian,

ruang digital, dan kearifan lokal. Lima belas sumber utama dipilih berdasarkan kesesuaian tema, kejelasan identitas bibliografis, keterlacakan penerbit atau jurnal, dan kontribusinya terhadap fokus kajian.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, sumber dibaca dan dikelompokkan berdasarkan empat indikator moderasi beragama. Kedua, temuan antarsumber dibandingkan untuk mengidentifikasi hubungan antara nilai moderasi, pencegahan konflik, pendidikan, dan kohesi sosial. Ketiga, hasil sintesis ditafsirkan dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia untuk merumuskan tantangan dan strategi penguatan. Kajian ini bersifat konseptual sehingga tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi kondisi seluruh daerah, melainkan menyusun kerangka analitis yang dapat digunakan dalam penelitian empiris berikutnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan

1. Moderasi Beragama sebagai Arsitektur Perdamaian

Moderasi beragama dapat dipahami sebagai arsitektur sosial bagi perdamaian. Ia bekerja dengan memastikan bahwa keyakinan yang kuat tidak berkembang menjadi klaim untuk meniadakan hak kelompok lain. Abror (2020) menegaskan bahwa toleransi berada pada ranah interaksi sosial: setiap kelompok tetap mempertahankan keyakinannya,

tetapi menyediakan ruang aman bagi pihak lain untuk menjalankan agama dan kehidupan sosialnya. Kerangka ini menghindari dua ekstrem, yaitu relativisme yang menghapus identitas dan eksklusivisme yang menolak keberadaan pihak berbeda.

Sebagai arsitektur sosial, moderasi menghubungkan nilai keagamaan dengan kewargaan. Komitmen kebangsaan menyediakan aturan bersama melalui Pancasila, konstitusi, dan prinsip kesetaraan warga. Toleransi menjaga kebebasan dan dialog. Anti-kekerasan membatasi penggunaan intimidasi fisik maupun simbolik. Sikap akomodatif terhadap budaya lokal memungkinkan nilai universal diterjemahkan ke dalam praktik yang dikenal masyarakat. Sulton (2023) menunjukkan bahwa integrasi, toleransi, dan akomodasi agama-budaya merupakan unsur penting penerapan moderasi di Indonesia.

Hubungan antareleman tersebut menghasilkan kohesi sosial. Kohesi bukan keseragaman, melainkan kemampuan kelompok yang berbeda untuk mempertahankan identitas sambil membangun kepercayaan dan tujuan bersama. Koto, Muzaki, dan Kholifah (2025) menempatkan toleransi dan kerukunan antarumat sebagai prasyarat stabilitas sosial. Karena itu, moderasi beragama perlu diukur dari praktik nyata: keamanan menjalankan ibadah, keterbukaan dialog, penolakan ujaran kebencian, kerja sama sosial, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

2. Empat Indikator Moderasi Beragama

Indikator pertama adalah komitmen kebangsaan. Komitmen ini tidak menempatkan agama dan negara sebagai dua kutub yang saling meniadakan, tetapi menjadikan nilai kebangsaan sebagai kesepakatan publik untuk melindungi seluruh warga. Kesetiaan terhadap Pancasila dan konstitusi memberi batas bahwa ekspresi keagamaan tidak boleh merampas hak sipil pihak lain. Dalam masyarakat plural, kerangka kebangsaan juga mencegah ideologi transnasional atau sektarian menggantikan kesepakatan hidup bersama.

Indikator kedua adalah toleransi. Toleransi tidak identik dengan sikap pasif atau sekadar membiarkan perbedaan. Toleransi menuntut pengakuan atas martabat, kebebasan, dan hak kelompok lain, sekaligus membuka dialog ketika terjadi perbedaan kepentingan. Saputri et al. (2023) mengaitkan toleransi dengan keadilan dan inklusivitas. Dalam praktik, toleransi diwujudkan melalui penghormatan terhadap rumah ibadah, penolakan diskriminasi, kebebasan menyampaikan pandangan secara bertanggung jawab, dan kerja sama sosial lintas agama.

Indikator ketiga adalah anti-kekerasan. Kekerasan dapat berbentuk serangan fisik, ancaman, persekusi, pemaksaan, pelabelan sesat, atau ujaran yang mendehumanisasi. Prinsip anti-

kekerasan menempatkan dialog, mediasi, dan musyawarah sebagai mekanisme utama penyelesaian perbedaan. Fahri dan Zainuri (2020) menilai pendidikan Islam moderat dan inklusif sebagai instrumen penting untuk menghadapi radikalisme. Prinsip ini juga menuntut ketegasan institusi publik terhadap tindakan yang mengubah perbedaan keyakinan menjadi pembenaran kekerasan.

Indikator keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Moderasi beragama membedakan antara substansi ajaran dan ekspresi budaya, sehingga tradisi dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama dan hak asasi. Karyoto dan Hidayatullah (2025) menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat bersinergi dengan moderasi dalam memperkuat perdamaian. Nilai gotong royong, musyawarah, penghormatan kepada tetua, serta mekanisme adat dapat menjadi modal mediasi karena memiliki legitimasi sosial di tingkat komunitas.

3. Aktor dan Praktik Penguatan Perdamaian

Temuan empiris memperlihatkan bahwa moderasi menjadi efektif ketika diterjemahkan ke dalam interaksi sehari-hari. A'yun dan Maftuh (2025) menemukan bahwa dialog antaragama, kegiatan bersama, dan inisiatif warga di Perumahan Grandeast Residence Sidoarjo membantu membangun kepercayaan dalam lingkungan multikultural. Praktik tersebut menunjukkan bahwa

perdamaian tidak hanya dibentuk melalui seminar, tetapi melalui pertemuan rutin, penyelesaian masalah bersama, dan pengalaman positif antarwarga.

Kearifan lokal memperkuat proses tersebut. Ame, Suasta, dan Widyanto (2024) menemukan bahwa toleransi, komitmen kebangsaan, anti-kekerasan, dan penerimaan tradisi lokal menopang kehidupan masyarakat multikultural di Kahayan Tengah. Rahmatina dan Ali (2024), melalui perbandingan sumber Islam dan Hindu, juga menunjukkan titik temu etis yang dapat mendukung persatuan. Temuan ini menegaskan bahwa dialog lintas iman lebih produktif ketika mencari nilai bersama tanpa menghapus perbedaan teologis.

Tokoh agama memiliki posisi strategis karena pesan mereka memperoleh legitimasi spiritual dan sosial. Namun, otoritas tersebut harus digunakan untuk menjelaskan batas toleransi secara jernih, mencegah dehumanisasi, dan mengarahkan umat pada penyelesaian damai. Tokoh agama juga perlu menguasai komunikasi digital agar narasi moderat tidak kalah oleh konten provokatif. Dalam hal ini, Hefni (2020) menekankan perlunya produksi kontra-narasi yang substantif dan mudah diakses.

Lembaga pendidikan berfungsi sebagai ruang pembiasaan. Pendidikan moderasi perlu diintegrasikan ke dalam materi, metode belajar, budaya sekolah, dan

relasi antarsiswa. Muzaki dan Tafsir (2018) menekankan pendidikan yang menghargai keragaman, sedangkan Prastyani (2025) menunjukkan pentingnya pendidikan pluralisme dan multikulturalisme untuk membumikan kebinekaan. Pembelajaran dapat menggunakan diskusi kasus, proyek sosial lintas kelompok, literasi media, dan refleksi etis agar siswa tidak hanya menghafal definisi toleransi, tetapi mampu menerapkannya.

4. Tantangan dan Strategi Penguatan

Tantangan pertama adalah radikalisme digital. Algoritma media sosial dapat memperkuat ruang gema, mempersempit sumber informasi, dan mempercepat penyebaran potongan ceramah tanpa konteks. Strateginya adalah memperkuat literasi digital-keagamaan, kemampuan memeriksa sumber, etika berkomunikasi, serta produksi konten yang argumentatif dan menarik. Narasi moderat harus menjawab kegelisahan nyata generasi muda, bukan hanya mengulang istilah normatif.

Tantangan kedua adalah penafsiran eksklusif dan polarisasi kelompok. Penguatan moderasi perlu dilakukan melalui forum dialog yang aman, terstruktur, dan berorientasi pada masalah bersama. Dialog tidak harus menyatukan doktrin, tetapi membangun kesepakatan mengenai anti-kekerasan, penghormatan hak, dan tanggung jawab sosial. Kegiatan pelayanan publik, bantuan bencana, kebersihan lingkungan, atau perlindungan kelompok rentan dapat

menjadi medium kerja sama yang lebih konkret.

Tantangan ketiga adalah lemahnya kesinambungan kebijakan. Program moderasi sering berhenti pada sosialisasi, sementara perubahan sikap memerlukan pembiasaan, evaluasi, dan dukungan kelembagaan. Pemerintah perlu mengintegrasikan indikator moderasi dalam pendidikan, pelayanan publik, penguatan forum kerukunan, serta sistem respons dini konflik. Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) menyediakan kerangka indikator yang dapat diterjemahkan menjadi instrumen pemantauan sesuai konteks daerah.

Penguatan juga perlu menjaga sensitivitas lokal. Kebijakan yang seragam berisiko mengabaikan sejarah, struktur sosial, dan tradisi setiap komunitas. Karena itu, pemetaan aktor, sumber konflik, dan kearifan lokal perlu mendahului intervensi. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan masyarakat menjadi pelaku perdamaian, bukan sekadar penerima program. Dengan cara ini, moderasi beragama berkembang sebagai budaya kewargaan yang hidup dalam praktik sehari-hari.

5. Implikasi bagi Pendidikan Dasar

Bagi pendidikan dasar, moderasi beragama perlu ditempatkan sebagai pembentukan karakter dan kecakapan hidup bersama sejak awal. Peserta didik pada fase ini sedang membangun konsep diri, pola

pertemanan, dan cara menilai perbedaan. Karena itu, pembelajaran tidak diarahkan pada perbandingan doktrin yang kompleks, tetapi pada pengalaman konkret seperti menghormati teman, tidak mengejek identitas, berbagi ruang, bekerja sama, dan menyelesaikan perselisihan tanpa kekerasan. Nilai tersebut sejalan dengan indikator toleransi dan anti-kekerasan dalam kerangka Kementerian Agama Republik Indonesia (2019).

Integrasi moderasi dapat dilakukan melalui pendekatan lintas mata pelajaran dan budaya sekolah. Pendidikan Agama membangun dasar etis, Pendidikan Pancasila memperkuat kesetaraan warga, Bahasa Indonesia melatih dialog yang santun, sedangkan ilmu sosial dan seni mengenalkan keragaman budaya. Muzaki dan Tafsir (2018) menekankan pentingnya penghormatan serta empati dalam pendidikan multikultural. Dalam praktik, guru dapat menggunakan cerita, permainan peran, pembelajaran kooperatif, proyek gotong royong, dan pengenalan tradisi lokal agar konsep abstrak berubah menjadi pengalaman yang dipahami anak.

Lingkungan sekolah harus konsisten dengan materi pembelajaran. Aturan anti-perundungan, kesempatan berpendapat, perlakuan adil, dan penyelesaian konflik melalui mediasi merupakan bentuk kurikulum tersembunyi yang menentukan. Guru

berfungsi sebagai teladan dalam menggunakan bahasa yang tidak memberi stigma dan dalam memperlakukan perbedaan secara proporsional. Prastyani (2025) menegaskan bahwa pendidikan pluralisme dan multikulturalisme diperlukan untuk menjaga kebinekaan, sedangkan Saputri et al. (2023) menunjukkan pentingnya keadilan dan inklusivitas dalam membangun wawasan moderat.

Evaluasi moderasi pada pendidikan dasar sebaiknya berfokus pada perilaku yang dapat diamati, bukan pada label keagamaan siswa. Indikatornya dapat meliputi kemampuan mendengar, bekerja dalam kelompok yang beragam, menolak ejekan, menyampaikan ketidaksetujuan secara santun, membantu teman, dan mengikuti musyawarah. Portofolio, jurnal refleksi sederhana, observasi guru, dan proyek sosial dapat digunakan untuk melihat perkembangan. Kerja sama sekolah, keluarga, dan tokoh masyarakat diperlukan agar pesan mengenai penghormatan, anti-kekerasan, dan kebersamaan tidak berhenti di kelas, tetapi menjadi kebiasaan di lingkungan anak.

D. Kesimpulan

Moderasi beragama merupakan pilar perdamaian karena menyediakan prinsip untuk mengelola perbedaan tanpa mengurangi keteguhan keyakinan. Komitmen kebangsaan membangun kerangka kewargaan bersama; toleransi melindungi

kebebasan dan dialog; anti-kekerasan mengarahkan penyelesaian konflik secara damai; sedangkan sikap akomodatif terhadap budaya lokal membuat nilai moderat kontekstual dan berakar dalam masyarakat. Keempat indikator tersebut saling melengkapi dan membentuk kohesi sosial dalam masyarakat multikultural.

Penguatan moderasi memerlukan sinergi tokoh agama, lembaga pendidikan, pemerintah, media, keluarga, dan komunitas lokal. Strategi utama meliputi pendidikan multikultural yang aplikatif, dialog lintas iman, literasi digital-keagamaan, kontra-narasi yang kredibel, kebijakan yang berkelanjutan, dan revitalisasi kearifan lokal. Moderasi beragama karena itu tidak cukup diperlakukan sebagai wacana, tetapi harus menjadi praktik kewargaan dan kebudayaan yang dapat diamati dalam penghormatan hak, kerja sama, penolakan kekerasan, dan penyelesaian konflik secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M. (2020). Moderasi beragama dalam bingkai toleransi. *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 143-155. <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174>
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. *Inovasi: Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45-55.
- Ame, A., Suasta, I. W., & Widyanto, P. (2024). Moderasi beragama dalam masyarakat multikultural di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau (perspektif pendidikan Hindu). *HAPAKAT: Jurnal Hasil Penelitian*, 3(1). <https://doi.org/10.33363/hpkt.v3i1.1332>
- A'yun, Q., & Maftuh, M. (2025). Implementasi moderasi beragama pada masyarakat multikultural di Perumahan Grandeast Residence Masangan Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 9233-9240. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.26061>
- Badan Pusat Statistik. (2011). Kewarganegaraan, suku bangsa, agama, dan bahasa sehari-hari penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2020). Moderasi beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2), 95-100. <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>
- Hefni, W. (2020). Moderasi beragama dalam ruang digital: Studi pengarusutamaan moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 1-22. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>
- Karyoto, & Hidayatullah, R. (2025). Local wisdom and religious moderation: Synergy for peace. *al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 8(2), 1412-1421. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.1874>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Moderasi beragama. Jakarta: Badan

- Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Indonesia. PERSPEKTIF, 12(3), 1054-1062.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i3.9783>
- Koto, H. H., Muzaki, I. A., & Kholifah, A. (2025). Pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. *Al-Mau'izhoh: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 14-19.
<https://doi.org/10.31949/am.v7i01.13525>
- Muzaki, I. A., & Tafsir, A. (2018). Pendidikan multikultural dalam perspektif Islamic worldview. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 6(1), 57-76.
<https://doi.org/10.36667/jppi.v6i1.154>
- Prastyani, K. L. (2025). Membumikan kebinekaan bangsa Indonesia melalui pendidikan pluralisme dan multikulturalisme. *HAWARI: Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam*, 6(1).
<https://doi.org/10.35706/hw.v6i1.13212>
- Rahmatina, N., & Ali, R. (2024). Moderasi beragama sebagai pilar persatuan bangsa: Studi komparatif kitab suci Islam dan Hindu. *Religi: Jurnal Studi Agama-agama*, 20(1).
<https://doi.org/10.14421/rejusta.v20i1.5340>
- Saputri, R. A., Putranto, R. S., & Setyaningrum, W. F. (2023). Membangun wawasan moderat dalam konteks masyarakat multikultural dengan nilai-nilai Islam. *AR ROSYAD: Jurnal Keislaman dan Sosial Humaniora*, 2(1), 46-60.
<https://doi.org/10.55148/arrosyad.v2i1.863>
- Sulton. (2023). Moderasi beragama: Konsep dan penerapannya di